



**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI
KABUPATEN JEPARA**

JURNAL

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 1

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Khoirul Anam

14010113120018

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2019

ABSTRAK

Strategi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara

Khoirul Anam-14010113120018

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Adanya strategi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Jepara untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM serta mendeskripsikan hambatan pemerintah dalam pelaksanaan strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara. Untuk itu penulis menganalisa dengan menggunakan teori model dan dimensi strategi pemerintahan Muhammad Suwarsono, serta teori peran pemerintah dalam pengembangan UMKM oleh Gede Diva. Hasil dari penelitian ini adalah apa saja strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengembangan UMKM, serta hambatan dalam pelaksanaan strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Tipe penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek/objek penelitian sesuai dengan fakta - fakta maupun tentang suatu proses yang sedang berlangsung dilapangan. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi beserta pelaku UMKM. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah strategi bersifat inkremental (senantiasa meningkat) ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing dan penanggulangan kemiskinan serta termasuk pengembangan usaha yang ramah terhadap lingkungan. Serta hambatan yang dialami adalah kurangnya SDM, anggaran, sarana dan prasarana.

Saran dari penulis untuk Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi adalah menambah anggaran pelaksanaan strategi pengembangan UMKM serta menambah personil atau anggota lapangan Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi khususnya di Bidang UKM sehingga pelaksanaan strategi bisa lebih maksimal.

Kata Kunci: *UMKM Jepara, strategi pengembangan, pelaku usaha, pelaksanaan strategi*

ABSTRACT

Government Strategy in Developing MSMEs in Jepara Regency

Khoirul Anam-14010113120018

Department of Political and Government

Faculty of Social and Political Science

Diponegoro University

There is a policy strategy from the Jepara Regency Government to help solve three classic problems that often hit MSMEs, namely market access, capital, and technology which have often been discussed at seminars or conferences. So that this study aims to analyze the government's strategy in the development of MSMEs and describe government obstacles in the implementation of MSME development strategies in Jepara District. For this reason, the author analyzes using the model theory and dimensions of Muhammad Suwarsono's governance strategy, as well as the theory of the government's role in developing MSMEs by Gede Diva. The results of this study are what are the strategies carried out by the Jepara District Government in developing MSMEs, as well as obstacles in the implementation of MSME development strategies in Jepara Regency.

This study used descriptive qualitative method. This type of descriptive research is a problem solving procedure that is examined by describing the subject / object of research in accordance with the facts and about an ongoing process in the field. In obtaining data, researchers conducted interviews with the Office of Cooperative and Small and Medium Enterprises and Transmigration, and MSME actors. The results of the research that has been carried out are that the strategy is incremental (always increasing) aimed at pursuing high economic growth, employment, increasing competitiveness and poverty reduction and including developing environmentally friendly businesses. As well as the obstacles experienced are lack of human resources, budget, facilities and infrastructure.

Suggestions from the authors for the Jepara Regency Government especially the UKM Cooperative and Transmigration Office are to increase the budget for the implementation of MSME development strategies and to add personnel or members of the SME Cooperative and Transmigration Cooperative Office field especially in the SME Sector so that the strategy can be maximized.

Keywords: Jepara MSMEs, development strategies, business people, strategy implementation

1. Pendahuluan

UMKM di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UMKM. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan merupakan motor penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Kehadiran UMKM bukan saja dalam rangka peningkatan pendapatan tapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor UMKM melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.

Tentu tantangan yang dihadapi pemerintah pusat berbeda dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah banyak disibukkan dengan masalah khas di daerah seperti kemiskinan sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai banyak UMKM dibanding dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Kudus, Pati dan Demak. Di tahun 2015 jumlah UMKM di Jepara mencapai 47.721 dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 172.956 pekerja. Pada sentra-sentra industrinya, seperti sentra industri kerajinan seni ukir, patung dan relief, sentra industri logam dan lain sebagainya berkembang sangat baik, yang semula hanya beberapa saja, dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya

yang sekaligus terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Di Kabupaten Jepara sendiri telah di bentuk UMKM Jepara Center, yaitu sebuah program dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jepara dalam bidang pembinaan, pengembangan, dan pelatihan UMKM Jepara. UMKM Jepara center dibentuk untuk menjadi wadah yang menampung wirausaha yang siap mengembangkan bisnis mereka. Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri telah mengeluarkan Perda no 19 tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kabupaten Jepara yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Akan tetapi, karena terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah Jepara dan beberapa berbenturan dengan kebijakan lain, semua hal yang tertuang dalam Perda tersebut belum dapat dilakukan. Pengalihannya dengan memberikan banyak pelatihan SDM dan pengembangan mutu dengan intensitas yang lebih banyak.

UMKM memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan perekonomian rakyat, namun kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang biasa dialami oleh UMKM di Jepara, diperlukan adanya strategi kebijakan dari pemerintah yang pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UMKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

2. Teori dan Metoda

2.1 Teori Model dan Dimensi Strategi Pemerintahan

Dalam bukunya Suwarsono Muhammad (2012:63-71) menegaskan bahwa ada lima tokoh besar dalam strategi pemerintahan yaitu : John M. Bryson, Paul C. Nutt, Robert W. Backoff, Geoff Mulgan dan Mark H. Moore. Dimana lima tokoh tersebut memberikan pandangannya masing-masing terhadap strategi pemerintahan. Terdapat 4 model Strategi pemerintahan yang diuraikan oleh para ahli diatas, antara lain:

- a. Strategi Pemerintahan Model Bryson : Konservatif
- b. Strategi Pemerintahan Model Nutt dan Backoff : Klasik
- c. Strategi Pemerintahan Model Mulgan : Progresif
- d. Strategi Pemerintahan Model Moore : Proporsional

Karya Geoff Mulgan merupakan representasi yang pas atas paham yang menyatakan bahwa strategi publik berbeda secara signifikansi dengan strategi perusahaan. Mulgan memberikan beberapa contoh diantaranya, penjara dan rumah sakit sama-sama membutuhkan pengelolaan berkualitas tetapi strategi untuk mengatasinya berbeda. Rincian strategi untuk menciptakan pekerjaan berbeda dengan strategi untuk mengurangi tingkat

kriminalitas. Contoh lain, strategi yang diimpor perusahaan juga tidak bisa membantu memenangkan pertempuran militer, sekaligus bisa membantu dalam logistik dan pencarian personalia.

Organisasi publik memiliki konteks unik yang berbeda dengan perusahaan. Dari sisi kendala misalnya, organisasi publik perlu lebih memperhatikan opini publik. Organisasi publik juga mengenal betul apa yang disebut dengan faksi politik. Dari sisi penerimaan ada batasan kemampuan pembayaran pajak. Dari sisi peluang, organisasi publik dalam batas-batas tertentu bisa dikatakan memiliki alat yang lebih variatif dan kadang-kadang memiliki kemampuan memaksa, misalnya melalui regulasi. Karena pandangannya yang tegas ini mengategorikan karya Mulgan sebagai Progresif.

Singkatnya model Mulgan disebut sebagai progresif karena berjalan menghindari terlalu jauh dari manajemen bisnis dan memberikan porsi yang amat besar pada elemen ilmu politik.

a. Integrasi ke depan

Integrasi ke depan berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel. Semakin banyak pemasok yang menjalankan strategi integrasi ke depan contohnya dengan cara membangun situs web secara langsung menjual produk mereka kepada konsumen.

Cara yang efektif untuk menerapkan integrasi ke depan adalah pewartalabaan (franchising). Bisnis memanfaatkan pewartalabaan untuk mendistribusikan produk atau jasa mereka. Bisnis dapat melakukan ekspansi secara cepat melalui

pewaralabaan karena biaya dan peluang yang muncul disebar dikalangan banyak individu.

b. Penetrasi pasar

Penetrasi pasar adalah strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-produk promosi penjualan secara ekstensif atau pelipatgandaan upaya-upaya pemasaran.

c. Pengembangan produk

Pengembangan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan.

d. Diversifikasi

Diversifikasi terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif.

2.2 Teori Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Menurut Gede Diva (2009:15-18), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:

a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas

fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung.

b. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif.

c. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

3. Hasil Penelitian

3.1 Model dan Dimensi Strategi Pemerintahan Kabupaten Jepara

Menurut analisa dari penulis, maka bisa diambil kesimpulan bahwa strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara bisa dikategorikan sebagai:

a. Strategi Pemerintahan Model Mulgan: Progresif

Strategi yang dijalankan merupakan tindakan yang bersifat inkremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi, bukan dari apa yang terjadi.

Pemerintah Kabupaten Jepara menyadari bahwa ketika pelaku UMKM telah berhasil dalam membangun/memulai suatu usaha baru, tantangan berikutnya adalah bagaimana strategi dan cara mengembangkan usaha yang dimiliki agar menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Di tahun 2015 jumlah industri di Kabupaten Jepara adalah 12.068 industri. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan rata-rata yaitu 0,03 persen/tahun dari tahun 2016-2018.

Tabel 1: Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah	Kenaikan %
2016	19.390	0,35
2017	19.464	0,38
2018	19.551	0,41

Sumber: Data Pertumbuhan Industri Tahun 2018, Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara bisa dimasukkan dalam kategori model strategi progresif. Hal ini bisa dilihat dari indikasi-indikasi berikut:

(1) Integrasi ke Depan

Strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retailer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi, atau memperoleh kendali. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur, atau dalam hal ini pemasok menyebabkan semakin

meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur. *E-Commerce, franchise, factory outlet* adalah bentuk pengembangan strategi integrasi ke depan. Di tahun 2015 jumlah *E-Commerce* di Kabupaten Jepara adalah 3.687. Pertumbuhan industri *E-Commerce* di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan rata-rata 0,17 persen/tahun dari tahun 2016-2018.

Tabel 2: Pertumbuhan Industri E-Commerce di Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah	Kenaikan %
2016	4.982	0,26
2017	6.725	0,55
2018	7.547	0,57

Sumber: Data Pertumbuhan E-Commerce 2018, Dinas Koperasi UKM Tenagakerja dan Transmigrasi

(2) Penetrasi Pasar

Penetrasi pasar adalah strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-produk promosi penjualan secara ekstensif atau pelipatgandaan upaya-upaya pemasaran. Penetrasi pasar juga dapat diartikan memperkuat diri di pasar yang sudah dikuasai dengan menjual produk/jasa yang sama. Penetrasi pasar dilakukan untuk mendapatkan loyalitas dari konsumen. Salah satunya dapat dilihat dari nilai Ekspor industri yang ada di Kabupaten Jepara.

Tabel 3: Pertumbuhan nilai Ekspor Industri di Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah USD	Kontribusi terhadap PDRB (%)
-------	------------	------------------------------

2016	219,87 Juta	12,89
2017	278,89 Juta	13,47
2018	344,13 Juta	14,38

Sumber: Data Pertumbuhan nilai Ekspor Tahun 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara

Nilai ekspor untuk produk UMKM Kabupaten Jepara terus meningkat dari tahun 2016-2018. Hal ini juga berpengaruh pada kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Jepara. Meningkatnya PDRB Kabupaten Jepara berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya ekonomi serta laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara.

(3) Pengembangan Pasar

Pengembangan pasar meliputi pengenalan produk atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah geografis yang baru. Pemerintah Kabupaten Jepara selalu memfasilitasi pelaku UMKM dengan beberapa program untuk menambah pasar atau persebaran produk-produk UMKM dari Kabupaten Jepara. Salah satunya dengan memfasilitasi beberapa UMKM produk unggulan untuk mengikuti event pameran Produk Unggulan Daerah, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun event Nasional.

Tabel 4: Daftar event pameran tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

Tingkat	Nama Event
Kabupaten	Festival Kartini, Pameran Produk Unggulan dari Petani, Troso Festival, Pameran Produk Unggulan UMKM
Provinsi	Festival Jateng, Pameran Produk Unggulan dan Potensi

	Daerah, UKM Jateng Expo
Nasional	INACRAFT, Gebyar UKM, UKM Expo

Sumber:

<http://www.kartninews.com/2018/02/daftar-jadwal-event-di-kabupaten-jepara.html?m=1>

(4) Pengembangan Produk

Pengembangan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Pengembangan produk biasanya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan pengembangan. Pengembangan pasar adalah upaya yang dilakukan ketika pasar lama sudah jenuh, stabil, maka bisa melakukan upaya untuk membuka di pasar yang baru.

Pemerintah Kabupaten Jepara selalu mendorong para pelaku UMKM untuk menambahkan inovasi-inovasi baru kepada produk mereka dengan adanya program Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan keterampilan usaha. Dimana pembinaan tersebut untuk pelaku usaha mebel berisi masukan model-model mebel yang sedang trending di pasar kemudian diberi tambahan ornamen ukiran pada mebel tersebut. Sedangkan untuk pelaku usaha di bidang industri makanan Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan pembinaan pengembangan makanan melalui variasi rasa makanan (*green tea, pizza, BBQ*, dll).

(5) Diversifikasi

Diversifikasi terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Upaya yang dilakukan pengusaha/

produsen/ perusahaan untuk mengusahakan atau memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya.

3.2 Peran Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pengembangan UMKM

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan.

a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program: (1) fasilitasi pameran produk unggulan daerah, (2) fasilitasi sertifikat halal, (3) pelatihan kemasan (packaging), (4) pelatihan pemasaran melalui e-commerce bagi pelaku usaha kecil, (5) pelatihan keterampilan dan pengembangan desain produk UMKM.

b. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat

kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya: (1) Perda No 19 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jepara, (2) Identifikasi dan Validasi data UMKM untuk menyusun satu perangkat indikator daya saing UMKM.

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program: (1) penataan kelembagaan pengembangan manajemen pengelolaan umkm, (2) pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan keterampilan usaha.

3.3 Hambatan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pelaksanaan Strategi

Dalam melaksanakan sebuah strategi kebijakan, tentunya tidak selalu sesuai dengan apa yang direncanakan. Pasti ada faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan strategi kebijakan. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan strategi kebijakan juga memiliki hambatan-hambatan dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan strategi adalah: (1) Kurangnya SDM dalam Satuan Pelaksana Strategi, (2) Sarana dan Prasarana belum memadai, (3) Jadwal pelaksanaan strategi kebijakan yang berbenturan dengan urusan kedinasan mendesak (urgent), (4) Penyesuaian jadwal dengan narasumber.

4. Simpulan

Pembangunan dibidang UMKM merupakan upaya menumbuhkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas sasaran pembangunan. Dokumen Renstra telah memuat tentang kebijakan yang diatur di daerah maupun ditingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi) serta target sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya, sebagai acuan perencanaan penganggaran tahunan pada saat penyusunan Rencana Kerja Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara.

Berdasarkan model dan dimensi strategi pemerintahan, hasil analisa

observasi serta wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti berpendapat bahwa strategi pengembangan UMKM di Jepara termasuk dalam model strategi progresif. Strategi yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan memiliki dampak positif adalah:

1. Integrasi ke depan
2. Penetrasi pasar
3. Pengembangan pasar
4. Pengembangan produk
5. Diversifikasi

Hal ini dibuktikan dengan jumlah industri di tahun 2018 mencapai 19.551 industri. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan rata-rata yaitu 0,03 persen/tahun dari tahun 2016-2018. Serta meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Jepara. Meningkatnya PDRB Kabupaten Jepara berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya ekonomi serta laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara.

Permasalahan yang biasa dialami oleh UMKM di Jepara yaitu akses pasar, modal, dan teknologi produksi. Arah strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengembangan UMKM pada intinya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing dan penanggulangan kemiskinan serta termasuk pengembangan usaha yang ramah terhadap lingkungan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki peran sebagai fasilitator yakni memfasilitasi apa yang dibutuhkan pelaku UMKM, peran sebagai regulator yakni membuat kebijakan yang mempermudah usaha UMKM, dan peran sebagai katalisator yakni mempercepat proses

berkembangnya UMKM *menjadi fast moving enterprise*.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara adalah: (1) Kurangnya SDM dalam Satuan Pelaksana Strategi, (2) Sarana dan Prasarana belum memadai, (3) Jadwal pelaksanaan strategi kebijakan yang berbenturan dengan urusan kedinasan mendesak (urgent), (4) Penyesuaian jadwal dengan narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Jakarta: Suara Bebas. hlm 4
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management. hlm 15-18
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 3
- Hasibuan, Malayu S. P. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 1
- Hunger, J.D. dan Wheelen, T.L. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability (13th Edition)*. New York: Pearson. hlm 53
- John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., (2008). *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat. hlm 21
- Koontz-O'Donnell, 1972, *Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions*, New York: McGraw Hill, hlm. 111
- Malayu S. P. Hasibuan, 2009, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 183
- Miftah Thoha, 2003, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 80
- Muhammad, Suwarsono, 2012, *Strategi Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga, hlm 64-90
- Nanang Fattah, 2008, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. IX, hlm. 71
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm 1
- Tjandra, Riawan W,dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. hlm 197